

BAB 1

PENDAHULUAN

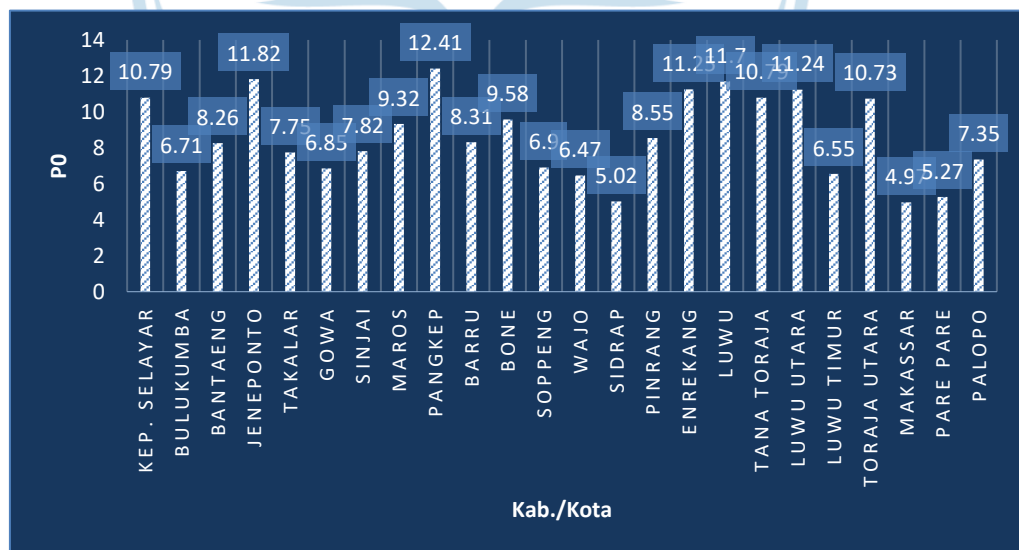
1.1. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan dan kemiskinan merupakan dua sisi mata uang yang saling berhubungan. Kesejahteraan merupakan isu sentral dalam pembangunan manusia yang terdeklarasi sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks ini, kemiskinan bukanlah sekadar persoalan ekonomi melainkan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental seperti hak atas hidup layak, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan multidimensional yang masih sulit terpecahkan hampir di setiap daerah di Indonesia. Kemiskinan yang masih persisten di Indonesia telah mendorong lahirnya komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). Esensi SDGs pertama yang harus dicapai pada tahun 2030 yakni ‘Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun’ yang kemudian menjadi tulang punggung agenda pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

Adapun persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 sebesar 8,57% sedikit menurun 0,79% terhadap Maret 2024 (BPS, 2025). Persentase ini masih cukup jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yakni menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5% serta menghapuskan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2026 (Bappenas, 2025). Pada tahun 2024, terdapat sekitar 20 daerah dari 38 Provinsi dengan tingkat kemiskinan lebih dari 9%. Provinsi Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan

persentase kemiskinan tertinggi yakni sebesar 29,66% dan Bali menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah yakni sebesar 3,8%.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat kemiskinan sebesar 7% pada tahun 2024. Walaupun angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional dan sering dianggap sebagai ukuran keberhasilan pembangunan daerah, namun nyatanya terjadi fenomena ketimpangan yang cukup signifikan antarwilayah dalam kemiskinan di 24 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan. Tingkat kemiskinan yang bervariasi antar wilayah ini menunjukkan adanya ketimpangan spasial dalam distribusi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, baik dalam segi pendapatan, akses pendidikan, maupun layanan kesehatan. Disparitas kemiskinan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 2024 disajikan pada Gambar 1.1 di bawah ini.



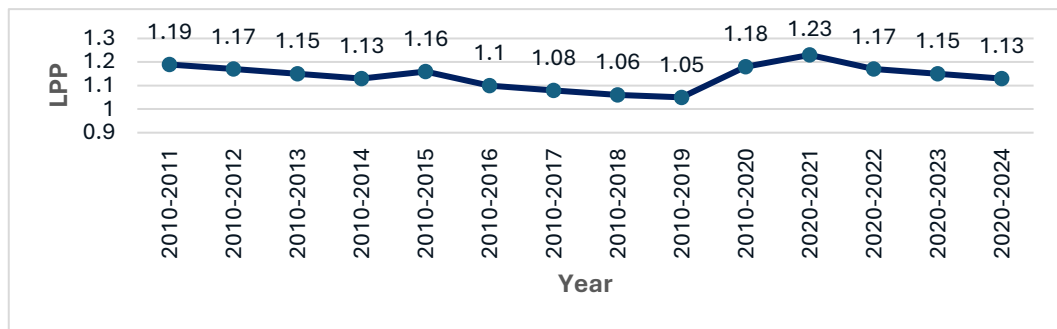
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024 (diolah)

Gambar 1.1
Persentase Kemiskinan di Sulawesi Selatan Tahun 2024

Gambar 1.1 menunjukkan Kabupaten Pangkep, Jeneponto, dan Luwu masih menjadi wilayah dengan persentase kemiskinan tertinggi di Sulawesi Selatan masing-masing sebesar 12,41%, 11,82%, dan 11,70%, serta masih terdapat lima wilayah lainnya yang memiliki persentase kemiskinan di atas 10%. Sementara itu, wilayah Makassar, Sidrap, dan Pare-Pare kemudian menjadi kota/kabupaten dengan persentase kemiskinan terendah yakni masing-masing sebesar, 4,97%, 5,02%, serta 5,27%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum kondisi provinsi terlihat sudah baik dalam angka, namun ternyata masih terdapat wilayah-wilayah yang tertinggal dan menghadapi tantangan struktural dalam pengentasan kemiskinan. Situasi ini menciptakan kesenjangan yang perlu menjadi perhatian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Pemahaman yang lebih komprehensif tentang kemiskinan mencakup berbagai dimensi. Salah satu dimensi tersebut yakni faktor sosial-demografis yang turut memengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data BPS yang disajikan pada Gambar 1.2 di bawah terlihat adanya tren penurunan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun, meskipun penurunannya cenderung relatif kecil.

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar 1,23% dan menjadi angka tertinggi sejak 24 tahun terakhir. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi sebesar 1,17%, kemudian pada tahun 2023 menurun lagi menjadi sebesar 1,15%. Meskipun sempat mengalami sedikit fluktuasi, secara umum arah laju pertumbuhan penduduk menunjukkan kecenderungan penurunan hingga tahun 2024.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024 (diolah)

Gambar 1.2

Laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan Periode 2010-2024

Berdasarkan klasifikasi BPS, laju pertumbuhan penduduk dibagi dalam tiga kategori, yakni rendah ($<1\%$), sedang ($1\%–1,49\%$), dan tinggi ($\geq 1,5\%$). Maka demikian, laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Selatan selama periode 2010-2024 termasuk dalam kategori pertumbuhan penduduk sedang. Pertumbuhan penduduk yang tergolong sedang akan menimbulkan tekanan terhadap sumber daya dan layanan publik, terutama di daerah dengan urbanisasi pesat atau infrastruktur terbatas sehingga kondisi ini dapat menghambat efektivitas penanggulangan kemiskinan.

Salah satu indikator demografis lainnya yang cukup penting untuk dianalisis yakni Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dengan penduduk usia produktif (15–64 tahun). Rasio ini memiliki dampak langsung terhadap dinamika ekonomi, karena tingginya beban ketergantungan (*burden of dependency ratio*) dapat memperbesar risiko kemiskinan, terutama di wilayah dengan kapasitas ekonomi terbatas.

Berdasarkan data BPS, rasio ketergantungan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 mencapai 44,78%. Artinya setiap 100 orang yang berusia produktif, harus menanggung beban sekitar 45 orang yang tidak produktif usia 0-14 tahun dan di atas 65 tahun. Rasio Ketergantungan yang tinggi, apabila tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai akan berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan akibat tingginya jumlah penduduk yang bergantung pada kelompok usia produktif.

Tingkat pendidikan yang rendah berpotensi menciptakan siklus kemiskinan antargenerasi, oleh sebab keterbatasan akses terhadap pendidikan berdampak langsung pada minimnya peluang kerja yang layak dan produktif. Fenomena ini dapat memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga dalam jangka panjang. Data terbaru BPS (2024) menunjukkan sekitar 4,6 juta anak Indonesia dan 140.000 anak di Provinsi Sulawesi Selatan yang putus atau tidak bersekolah. Pada tahun 2021, Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan kelima sebagai provinsi dengan tingkat Angka Putus Sekolah (APS) tertinggi di Indonesia. Fenomena ini kemudian memiliki implikasi yang luas. APS yang tinggi mengindikasikan potensi sumber daya manusia yang besar tidak termanfaatkan secara optimal. Ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat memperpanjang siklus kemiskinan dalam rumah tangga.

Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Rasio Ketergantungan, dan tingkat Pendidikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan menjadi krusial dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menambah beban terhadap sistem

kesejahteraan, rasio ketergantungan yang besar dapat membatasi alokasi sumber daya bagi kelompok produktif, sementara rendahnya tingkat pendidikan menjadi kendala dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2024?
2. Bagaimana pengaruh rasio ketergantungan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2024?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio ketergantungan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pemerintah dalam upaya mereka untuk mengurangi kemiskinan. Dengan menggunakan informasi dalam penelitian ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif, mengalokasikan anggaran dengan lebih tepat sasaran, dan memantau kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan.
2. Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akar permasalahan kemiskinan dan mendorong partisipasi mereka dalam upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya di provinsi wilayah studi tetapi di berbagai daerah di Indonesia.
3. Perguruan Tinggi, penelitian ini diharapkan dapat memicu penelitian lanjutan oleh mahasiswa atau dosen, yang demikian dapat menghasilkan publikasi ilmiah dan meningkatkan reputasi perguruan tinggi.

1.5. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dan berbagai pertimbangan penelitian terdahulu serta teori yang ada, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yakni:

1. Diduga pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2024.
2. Diduga rasio ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2024.

3. Diduga pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2024.

1.6. Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan usulan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab I dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II dalam penelitian ini akan menjelaskan dan menguraikan teori berdasarkan bukti empiris mengenai kemiskinan dan faktor-faktor interaksi demografis seperti pertumbuhan penduduk dan rasio ketergantungan, juga faktor pendidikan yang diasumsikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan berdasarkan kajian dan penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III dalam penelitian ini terdiri dari data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik analisis data, metode analisis data, dan tahapan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV dalam penelitian ini akan menjelaskan dan menjabarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh dari tahapan analisis data pada model dan alat analisis data yang telah diestimasi.

BAB V PENUTUP

Bab V dalam penelitian ini yaitu menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran kepada pemangku kepentingan yang relevan dengan penelitian ini.

